

Peningkatan Peran Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem dan Konservasi Lingkungan di Dieng Plateau

ABSTRAK

Oleh
Siti Aisyah
(aisyah@ut.ac.id)

Kawasan Dieng Plateau merupakan salah satu kawasan penting dalam menyangga keseimbangan ekosistem dan paru-paru dunia khususnya di daerah Jawa Tengah dan Pulau Jawa pada umumnya. Kawasan ini meliputi 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kendal, Batang dan Pekalongan. Selain itu, di dalam kawasan ini juga terdapat 8 (delapan) daerah aliran sungai (DAS), kawasan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tingkat kepemilikan lahan yang rendah menyebabkan terjadinya tekanan terhadap kawasan lindung, yakni terjadinya pengalihan fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Tingkat erosi kawasan Dieng mencapai lebih dari 180 ton/ha/tahun.

Saat ini, kawasan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk usaha budidaya tanaman kentang, sayuran dan tembakau, yang merupakan sumber matapencaharian penduduk setempat. Kondisi ini menyebabkan degradasi lahan yang mengakibatkan semakin meluasnya lahan kritis di kawasan tersebut. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat, Dieng Plateau berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan bahan baku industri dan jasa lingkungan.

Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan perannya dalam melakukan penataan dan pemulihan Kawasan Dieng yang disusun berdasarkan kaidah ekosistem dan konservasi, dengan harapan akan terjadi keseimbangan antara produktivitas, kelestarian dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga dapat dipergunakan sebagai arahan untuk mengembalikan peranan dan fungsi kawasan tersebut secara optimal ditinjau dari berbagai segi ekologis, sosial-budaya, ekonomi dan kebijakan.

Key Words: empowering, , enviroment, policy

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan millennium 2015 adalah memastikan kelestarian lingkungan hidup. Berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup maka Negara-negara yang ikut serta menandatangani Deklarasi Millennium PBB pada September 2000 menyetujui agar:

- a. mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan
- b. pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat
- c. pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.

Kawasan Dieng Plateau merupakan salah satu kawasan terpenting di Indonesia yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di Pulau Jawa. Namun saat ini kondisi kawasan sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan dunia internasional. Makalah ini berupaya membahas tentang pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.

KONDISI KAWASAN DIENG PLATEAU

Kawasan Dataran Tinggi Dieng atau lebih dikenal dengan Dieng *Plateau* merupakan salah satu wilayah sempit di tengah-tengah Pulau Jawa dengan hutan yang alami, terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dataran Tinggi Dieng terletak pada beberapa wilayah administratif, yaitu kabupaten Pekalongan, Batang, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan Kendal. Permasalahan pada kawasan hutan negara di Dieng yaitu berkurangnya luas hutan negara, hal ini terjadi akibat adanya penjarahan hutan, penebangan pohon, penyerobotan lahan/okupasi hutan untuk komoditas tanaman kentang dan pihak masyarakat dan pemerintah setempat yang masih kurang memperhatikan pentingnya kelestarian alam. Selain hal-hal tersebut yang perlu menjadi perhatian adalah belum adanya zonasi kondisi kawasan hutan negara sehingga pengelolaan kawasan hutan belum terarah (Puspita, 2005).

Kawasan Dieng merupakan kawasan dataran tinggi. Dari kejauhan, kawasan Dieng tampak seperti puncak gunung yang patah sehingga menyisakan dataran dengan banyak kawah. Itulah sebabnya Dieng dinamai juga dengan *Plateau* yang berarti dataran di atas pegunungan(¹<http://taganawonosobo.wordpress.com/dieng-plateau-di-wonosobo/>) . Ditinjau dari Geomorfologi dikatakan dataran dan *plateau* adalah wilayah-wilayah dengan struktur yang relatif horizontal. Dataran mempunyai relief rendah dengan lembah-lembah dangkal, sedangkan

plateau mempunyai relief yang tinggi dengan lembah-lembah yang dalam. Berdasar asal usul kejadian vulkanik dikatakan *Dieng Volcanic Complex (also called the Dieng Plateau) is a complex volcano. A complex volcano is an extensive assemblage of spatially, temporally, and genetically related major and minor volcanic centers with the associated lava flows and pyroclastic rocks.* <http://www.scribd.com/doc/30323571/Geomorfologi>.

Secara etimologi kata "Dieng" berasal dari bahasa Sanskerta (Bahasa sastra Hindu kuno) versi lain menyebutkan kata Dieng berasal dari dari bahasa Sunda Kuna, karena diperkirakan pada masa pra-Medang sekitar tahun 600 Masehi daerah dieng berada dalam pengaruh politik Kerajaan Galuh. Kata "Dieng" berasal dari gabungan dua kata, yaitu "Di" yang berarti tempat dan "Hyang" yang berarti kahyangan, sedangkan menurut kamus ilmiah populer kontemporer "Hyang" memiliki arti Dewa Pencipta. Secara utuh dapat di definisikan, Dieng adalah tempat (yang berupa daerah pegunungan) bersemayamnya para dewa dewi. (<http://www.scribd.com/doc/30323571/Geomorfologi>).

Kawasan Dieng memiliki luas 54974.24 Ha. Kawasan ini secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah, dan berada di 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kendal, Batang dan Pekalongan. Sebagian besar Kawasan Dieng masuk dalam wilayah Kabupaten Pekalongan dengan luas 18,786.04 Ha. Luas tersebut terdistribusi ke dalam 7 kecamatan yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Petung Kriono seluas 12,182.68 Ha dan Kecamatan Lebak Barang seluas 2,505.03 Ha. Sebagian besar lainnya masuk ke dalam Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dengan luas masing-masing 11,795.34 Ha dan 11,647.98 Ha. Sedangkan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Batang masing-masing hanya sekitar 5000 Ha. Dan untuk Kabupaten Kendal luasnya lebih kecil lagi yaitu 1,541.34 Ha. Secara lebih rinci sebaran luasan dari tiap Kabupaten di Kawasan Dieng dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Kawasan Dieng yang Dirinci Menurut Wilayah Kabupaten dan Kecamatan

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (Ha)
Banjarnegara	Batur	5987.96
	Kalibening	1381.66

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (Ha)
	Pejawaran	2005.41
	Wanayasa	2420.32
Banjarnegara Total		11795.35
Batang	Bawang	2232.62
	Blado	2516.99
	Reban	836.72
Batang Total		5586.33
Kendal	Plantungan	1018.09
	Sukorejo	523.27
Kendal Total		1541.36
Pekalongan	Doro	191.15
	Kajem	855.02
	Karanganyar	551.49
	Lebak Barang	2505.05
	Paninggaran	1489.26
	Petung Kriono	12182.68
	Talun	1011.42
Pekalongan Total		18786.07
Temanggung	Candiroto	302.69
	Ngadirejo	1315.41
	Parakan	1669.07
	Tretep	2330.04
Temanggung Total		5617.21
Wonosobo	Garung	784.49
	Kejajar	8031.79
	Kertek	1535.3
	Mojo Tengah	368.43
	Watu Malang	398.17

KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (Ha)
	Watumalang	145.13
	Wonosobo	384.64
	Wonosobo Total	11647.95
Jumlah		54974.27

Sumber : Grand Design Dieng 2007

Kawasan ini dialiri 8 daerah aliran sungai (DAS), yaitu hulu DAS Serayu (seluas 22921 ha), hulu DAS Progo (seluas 2672.13 ha), hulu DAS Bodri Ds (seluas 3646.62 ha), hulu DAS Lampir Ds (seluas 5967.56 ha), hulu DAS Sengkarang Ds (seluas 16857.65 ha), hulu DAS Comal (seluas 380.48 ha), dan hulu DAS Sragi (seluas 2526.56 ha). Khusus untuk DAS Serayu, hulu kawasan ini menjadi daerah tangkapan air (DTA) waduk Sudirman yang merupakan investasi besar guna irigasi dan tenaga listrik.

Dilihat dari fungsinya, di dalam Kawasan Dieng terdapat kawasan konservasi 53,4 ha, Hutan Produksi Terbatas 26.170,08 ha, Hutan Produksi 489,89 ha, Hutan Lindung 7506,34 ha, dan Areal Penggunaan Lain 20.754,56 ha. Secara umum kondisi lahan di kawasan ini sangat kritis, tingkat erosi mencapai lebih dari 180 ton/ha/tahun. Walaupun kritis, di pihak lain sebagian besar luas wilayah kawasan justru dimanfaatkan untuk usaha budidaya tanaman kentang, sayuran dan tembakau. Sehingga dalam dekade terakhir ini kawasan tersebut telah mengalami banyak kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal yang mengakibatkan penurunan produksi pertanian dan jasa lingkungan (Grand Design Dieng, 2007). Padahal ketergantungan masyarakat terhadap kawasan ini sangat tinggi, karena telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan daerah dan masyarakat antara lain dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan bahan baku industri dan jasa lingkungan. Mengenai kerusakan kawasan ini, narasumber mengatakan,

“Justru problem visual yang bisa kita lihat adalah problem lingkungan. Orang masuk Dieng itu adalah kerusakan lingkungan, sehingga daya tarik Dieng juga semakin memudar, karena Dieng itu dari segi lingkungan yang dijual adalah view. Jadi ketika rusak, itu juga akibat langsungnya adalah wisatanya menjadi tidak menarik, mungkin orang hanya penasaran, sekali lihat Dieng ya sudah enggak akan kembali ke situ lagi, karena sudah rusak oleh pertanian”.¹

¹ Wawancara dengan Kepala Bagian Tata Ruang dan Wilayah, Bappeda Kabupaten Wonosobo, Agustus 2010

Kepadatan penduduk rata-rata di Kawasan Dieng mencapai angka 100 jiwa/km² dengan pemilikan lahan sempit rata-rata sebesar 0,1 ha. Desa di Kawasan Dieng yang paling padat penduduknya adalah desa Dieng, dan kecamatan Kejajar kepadatan penduduknya mencapai 190 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tingkat kepemilikan lahan yang rendah ini yang menyebabkan terjadinya tekanan terhadap kawasan lindung, dengan adanya pengalihan fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya. Konversi lahan ini yang menyebabkan degradasi lahan menyebabkan semakin meluasnya lahan kritis yang menyebar hampir menyeluruh di Kawasan Dieng akibat pemanfaatan lahan hutan di pegunungan Dieng secara besar-besaran untuk tanaman kentang.

Berbagai permasalahan lingkungan yang timbul di Kawasan Dieng dan berdampak ke daerah sekitarnya antara lain: (1) kerusakan hutan lindung, hutan produksi, dan cagar alam, (2) kerusakan situs purbakala Candi Dieng yang merupakan peninggalan sejarah kebudayaan Hindu dan sekaligus menjadi aset pariwisata budaya, (3) tingginya tingkat erosi dan sedimentasi pada badan-badan air, seperti telaga, lembah sungai, dan waduk, (4) tingginya penggunaan bahan-bahan kimia, seperti pupuk kimia, pestisida, dan insektisida dalam kegiatan pertanian yang menyebabkan kematian biota dalam tanah dan air permukaan, (5) semakin hilangnya tumbuhan langka, dan terdesaknya kelangsungan hidup populasi satwa langka seperti Elang Jawa (*Spezaetus bartelsii*), (6) menurunnya debit beberapa mata air di Kawasan Dieng, seperti mata air Bimo Lukar dll, (7) rendahnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam di Kawasan Dieng, (8) lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum aparat, seperti dalam perambahan hutan dan lahan miring, (9) hilangnya keindahan alam dan bau yang menyengat oleh penggunaan pupuk kandang yang tidak benar menurunkan daya tarik wisata Kawasan Dieng, (10) konflik kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang akhirnya dimenangkan pada sektor pengurusan sumberdaya lahan dengan mengutamakan tanaman kentang, (11) kebijakan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat dan pusat dipertanyakan tampak tidak berdaya sama sekali, dan (12) kerusakan lingkungan berkepanjangan dan mengarah kepada pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, tidak berkelanjutan, dan lebih menuruti kebutuhan ekonomi masyarakat yang mana tidak jelas visi, misi, dan tujuannya.

Berbagai permasalahan dan dampak yang ditimbulkan di Kawasan Dieng dan sekitarnya ditekankan oleh narasumber sebagai berikut:

“.....kerusakan fisik akibat dari proses agrikultural ..sangat intensif. Penanaman kentang yang terus menerus, 1 tahun 3x penanaman tanpa bergiliran, sementara curah hujan cukup tinggi itu menjadi erosi. Itu baru dari aspek erosi, disisi lain potensi bencananya juga semakin tinggi, seperti longsor. Kalau Bapak melihat ke sana tanaman pohon itu mungkin nol, sekian persenlah, itu diawali tahun 1979. Itu diinisiasi oleh orang-orang Pengalengan. Mengawali tanaman kentang seperti itu, tapi karena tanahnya belum pernah tersentuh hal-hal seperti itu hasilnya sangat tinggi, sehingga dalam periode dua dasawarsa Thn 80-90 secara ekonomi memang sangat luar biasa, pendapatan ekonomi masyarakat situ tidak kalahlah dengan pendapatan ekonomi masyarakat kota, konsumsinya juga sangat tinggi disana. Ada permasalahan, di satu sisi terjadi percepatan perkembangan ekonomi yang luar biasa, tapi disisi lain pendidikan di sana tertinggal, sehingga orang bilang orang bodoh tapi kaya. Dia tidak memikirkan eksit strategi ketika lahannya sudah tidak produktif, akibatnya tahun 2000 ini, mulai tahun 20003 trend angka kemiskinan disana naik 1% tiap tahun. Jadi kondisinya seperti itu, tahun 2006 kita prihatinlah.”²

Apabila dianalisis lebih lanjut penyebab terjadinya permasalahan kerusakan lahan dan semakin menurunnya kualitas lingkungan di Kawasan Dieng, antara lain: (1) daya tarik pasar dan produksi tanaman kentang yang sangat menjanjikan serta sempitnya kepemilikan lahan memicu untuk membuka lahan hutan pegunungan menjadi lahan pertanian, (2) tawaran (bujukan) investor dan perbankan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui budidaya tanaman kentang yang sukar dikendalikan, (3) tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kerusakan sumberdaya alam (lahan, air, dan hutan) dan kelestarian fungsi lingkungan, (4) menurunnya dan bahkan hilangnya kearifan lokal masyarakat Kawasan Dieng sehingga sudah tidak mempedulikan lagi keberlanjutan kelestarian lingkungan demi warisan dan titipan bagi generasi mendatang, (5) kurang terintegrasi (terpadu) dalam kesatuan program pembangunan lintas sektoral sehingga dalam penanganan Kawasan Dieng terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Hingga saat itu, tanah Dieng sudah dikuras dengan monopoli tanaman yaitu kentang. Hampir 90 % tanah di Dieng ditanami kentang. Kentang merupakan tanaman yang oleh masyarakat Dieng dianggap sangat menjanjikan untuk mengangkat perekonomian masyarakat Dieng. Pola tumpang sari yang dapat mempertahankan keberagaman unsur hara tanah seakan telah dikesampingkan oleh masarakat Dieng. Karena bisnis tanaman kentang di Dieng sangat menguntungkan, membuat harga tanah di sana sangat tinggi dan banyak peminatnya. Hal ini membuat oknum-oknum pejabat di sana lupa lingkungan sehingga pohon-pohon yang berada

² Wawancara dengan Kepala Bagian Tata Ruang dan Wilayah, Bappeda Kabupaten Wonosobo, Agustus 2010

dipegunungan Dieng diubah menjadi ladang kentang. Dieng menjadi gundul dan dikhawatirkan akan terjadi longsor di saat musim hujan. (<http://sosbud.kompasiana.com/2009/11/24/mari-kita-selamatkan-dieng/>).

”Dieng butuh rehabilitasi segera sebelum terlambat,” kata Bupati Wonosobo Kholiq Arif dalam Lokakarya dan Temu Donor Program Pemulihan Dieng ”Karena Dieng Membutuhkan Anda”, yang difasilitasi Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, Kemitraan, dan *Java Learning Center* (Javlec) di Jakarta, Senin (1/12). Tahun 2007, Bupati Wonosobo membentuk Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD). Kerusakan kawasan Dieng diyakini mengganggu suplai air, energi listrik, dan irigasi di lebih dari enam kabupaten. Sejauh ini upaya rehabilitasi masih terkendala sejumlah hal, termasuk pendanaan. ”Di lapangan, empat desa sudah menerapkan pertanian konservasi dengan model terasering, penanaman rumput di pematang, serta menanam tanaman tahunan,” kata pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang juga anggota TKPD, Agus Affianto. Dua tahun berjalan, upaya rehabilitasi lahan diakui masih belum lancar. Karena itu, penggalangan dukungan publik mutlak diperlukan. ”Dibutuhkan penjelasan yang lebih mudah diterima warga bahwa harus ada perubahan demi keberlanjutan jasa lingkungan,” kata pengajar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bramasto Nugroho, yang meneliti manfaat ekonomi, ekologis, dan kerugian atas kerusakan sumber daya lahan dan hutan kawasan Dieng. (http://www.ppk.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil.asp?Vnomer=1227)

Kawasan Dieng memiliki arti yang sangat penting ditinjau dari aspek ekologi, hidrologi, pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Kawasan Dieng tidak saja memiliki potensi hutan dataran rendah dan hutan pegunungan, tetapi juga merupakan salah satu daerah paling penting dalam mendukung kelangsungan hidup. Kebutuhan lahan pertanian di wilayah Dieng semakin tinggi dan hal itu yang kemudian memicu masyarakat melakukan perambahan hutan. Masalahnya, selain karena desakan ekonomi juga akibat kurang perhatian pemerintah terhadap kondisi hutan, instansi yang diberi konsensi menangani hutan. (Suara Merdeka, 2003).

Tata guna lahan telah disalah-gunakan karena masing-masing wilayah tidak digunakan sesuai peruntukan. Pemanfaatan daerah konservasi, tidak terawatnya daerah hutan produksi, pertanian di segala tempat dan penyedotan air tanpa pengelolaan telah mengakibatkan daerah ini sangat rawan bencana alam, selain juga menjurus ke arah proses pemiskinan bila pertanian tidak berkelanjutan ini tetap diteruskan. Selain itu sumber air bagi jutaan penduduk Jawa Tengah ini terancam kering bila pemerintah daerah dan lembaga pemerintah terkait serta penduduk

setempat, baik di kabupaten Wonosobo dan kabupaten lain di sekeliling pegunungan Dieng tidak segera turun tangan untuk menyelamatkan Dieng, agar tidak terjadi bencana alam luar biasa dan penduduk dapat hidup cukup dan aman secara berkelanjutan. (<http://www.terranel.or.id/tulisandetil.php?id=2062>).

Terdapat berbagai permasalahan menyangkut pengelolaan kawasan wisata oleh beberapa Pemda, misalnya permasalahan yang dihadapi di kawasan Dieng yang sangat kompleks. Tidak hanya masalah konservasi, tapi juga budaya, pariwisata, serta pertanian. Khusus di kabupaten Batang, penanganan kawasan Dieng ditangani oleh Bagian Lingkungan Hidup dan Produksi yang menitikberatkan pada aspek pelestarian lingkungan. Pelestarian yang menyangkut situs purbakala dikelola oleh berbagai instansi, seperti Kantor Kehutanan dan Perum Perhutani. Permasalahan yang berhubungan dengan situs purbakala perlu menggabungkan pula dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan agroekonomi. Kurangnya perawatan maupun pemeliharaan benda-benda maupun lingkungan di Dieng menyebabkan penurunan jumlah wisatawan karena kawasan tersebut sekarang menjadi gersang.

PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DIENG

Konsep pengembangan masyarakat yang melibatkan pemerintah ini sering dikatakan sebagai pendekatan *top down*. Di Indonesia Pengembangan Masyarakat melalui pendekatan *top down* telah melahirkan program berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) atau yang sekarang dikenal dengan BLT, Raskin, Askeskin, BOS, atau pun pengembangan industri agribisnis. Pada satu sisi pemerintah menganggap program yang digulirkan ini dapat meredam gejolak sosial yang terjadi sebagai akibat dampak kemiskinan masyarakat. Namun di sisi lain program ini telah menimbulkan '*social cost*' yang lebih mahal daripada manfaat ekonomi yang diperoleh; berupa munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat seperti konflik horizontal atau terjadinya disorganisasi sosial. Terpecahnya masyarakat dalam arus perseteruan akibat perebutan lahan pertanian atau perkebunan, sengketa tanah ulayat atau kerusuhan dalam pembagian BLT dan raskin merupakan contoh nyata akibat konsep pengembangan masyarakat yang bukan berangkat dari konsep partisipasi masyarakat (*bottom up*). Sehingga pada implementasinya justru merombak keutuhan komunitas. Konsep pengembangan masyarakat akan menjadi konsep yang adil bagi masyarakat bila menggunakan *bottoming up approach*

dengan melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada, dan dalam pengembangannya memperhatikan tradisi, adat-istiadat, dan potensi lokal yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial (Rudi, 2008).

Pentingnya Koordinasi Antar Pemda dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinasi pemerintahan sebagai salah satu fenomena dalam pemerintahan di Daerah merupakan aspek yang penting dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Koordinasi pemerintahan adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan, masalah kerja sama antara aparat pemerintahan dan pertalian satu sama lainnya. Sebagai suatu konsep, koordinasi mencakup beberapa unsur yang perlu diketahui seperti metode koordinasi, jenis-jenis koordinasi, aspek-aspek koordinasi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap koordinasi. Secara mendasar Forland mengemukakan 4 (empat) faktor yang menentukan efektifitas organisasi pemerintahan yaitu, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pengawasan dan observasi yang seksama, kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif dan ketrampilan memanfaatkan kepemimpinan.

Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah dalam praktiknya dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi dalam pengkoordinasian antar Perangkat Daerah, yang meliputi dinas-dinas Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sebagai pedoman terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan pokok sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perangkat Daerah. Tetapi penyusunan organisasi Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Daerahnya.

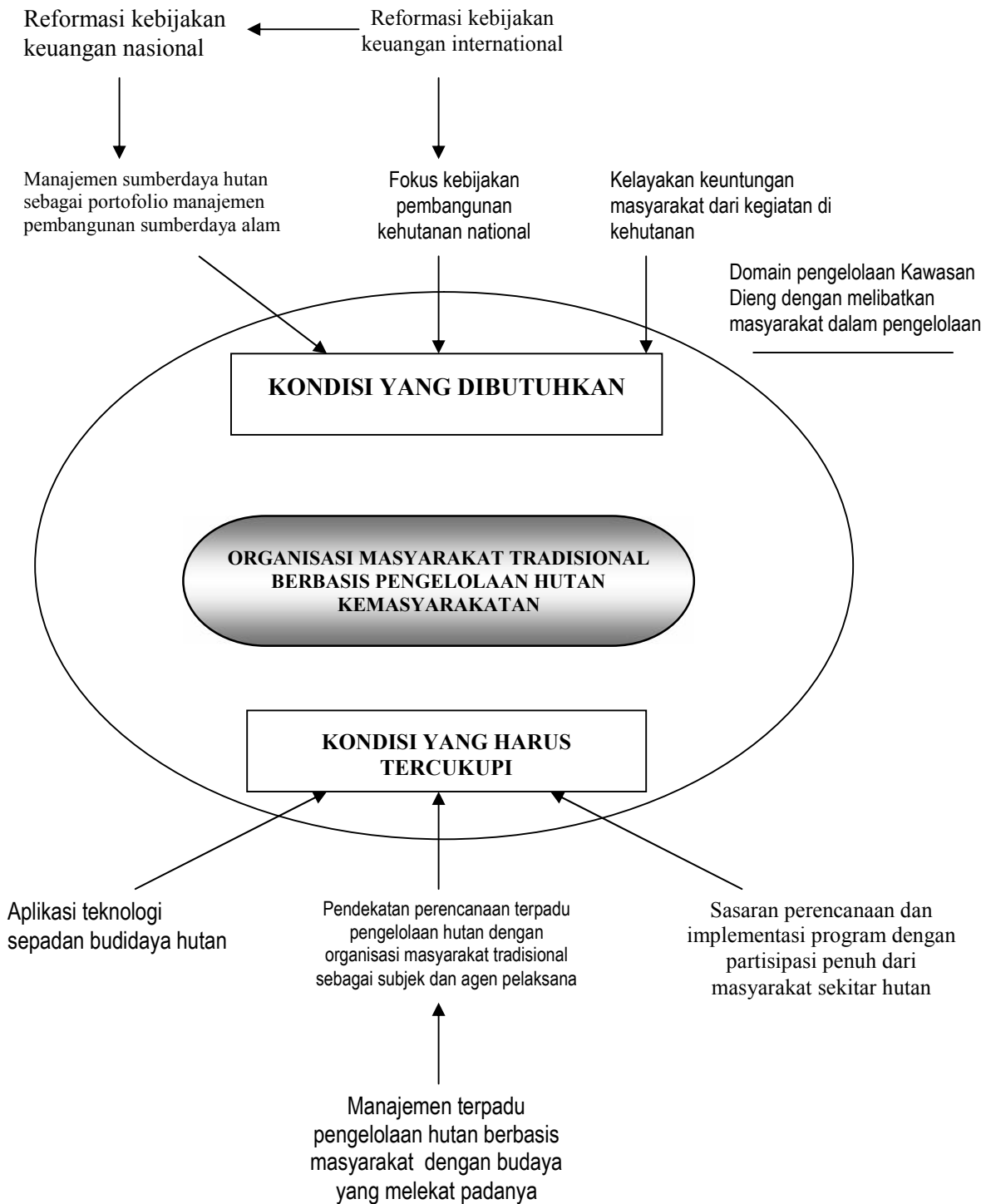
Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah dalam praktiknya dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi dalam pengkoordinasian antar Perangkat Daerah, yang meliputi dinas-dinas Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sebagai pedoman terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan pokok sebagai pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun Perangkat Daerah. Tetapi penyusunan organisasi Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Daerahnya.

Untuk koordinasi pengelolaan Kawasan Dieng, sudah semestinya, instansi BAPPEDA baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten harus berperanan. Mekanisme Musrenbang pada berbagai level perlu untuk mengangkat issue pemulihan peranan dan fungsi Kawasan Dieng. Pada berbagai koordinasi tersebut mestinya akan bisa diidentifikasi posisi dan peranan masing-masing pihak. Dan dari sini akan bisa diidentifikasi ketersediaan sarana-prasarana, dana dan ekspertis yang perlu dialokasikan dalam merencanakan pengelolaan pemulihan Kawasan Dieng.

Pentingnya koordinasi dari berbagai instansi dan peran masyarakat dalam turut serta mengelola kawasan Dieng dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar . Simplifikasi arah kebijakan makro pengelolaan hutan berbasis masyarakat dilihat dari perspektif sosial-ekonomi.



KESIMPULAN DAN SARAN

Peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memelihara kelestarian kawasan sehingga diharapkan akan memberi kontribusi bagi penyangga hidup masyarakat dan perekonomian nasional. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program memegang kunci utama dalam pengembangan pengelolaan kawasan Dieng Adapun arah kebijakan yang dapat disimpulkan dalam peningkatan peran pemerintah dan masyarakat adalah:

- pengembangan kawasan berbasis masyarakat
- pengembangan Cagar Alam berbasis masyarakat
- pengembangan hutan lindung berbasis masyarakat
- pengembangan kawasan Konservasi berbasis masyarakat

Dalam mengelola Kawasan Dieng dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, baik instansi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.

Saran

Masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan Dieng. Sebagai kawasan terpadu, Dieng diharapkan akan menjadi penyangga ekosistem di wilayah kabupaten Wonosobo, Kendal, Temanggung, Banjarnegara dan Batang. Dengan adanya beberapa daerah yang memiliki kepentingan terhadap kawasan ini, Dieng perlu ditata ulang kembali tata ruangnya dengan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan koordinasi antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- AMA (1993), *Local Authorities and Community Development: A Strategic Opportunity for the 1990s*, London: Association of Metropolitan Authorities.
- Mayo, M. (1994). "Community Work", dalam Hanvey and Philpot (eds), *Practising Social Work*, London: Routhledge.
- Rudi (2008). *Community Development: Apa dan Bagaimana?* Diakses pada tanggal 23.02.2010 dari <http://blogs.unpad.ac.id/rsdarwis/?cat=4%20-%2013k%20-Twelvetrees>, A. (1991). *Community Work*, London: McMillan
- Payne, M. (1995), *Social Work and Community Care*, London: McMillan
- Nurcahyo, Andik. (2008). Sepotong tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development). Diakses pada tanggal 24 April 2008 dari islamkuno.com/2008/01/16/sepotong-tentang-pengembangan-masyarakat-community-development/
- Dunham, Arthur (1962). *Community Welfare Organization (Principles and Practice)*. Third printing. New York: Thomas Y. Crowel Company.
- Sumber: Community Based Tourism Handbook (1997). Bangkok, Thailand: Responsible Ecological Social Tours Project (REST).
- Anderson, JE. (1975). *Public Policy Making*. London: Nelson
- Dirjen PR, Depkimpraswil. Pengembangan wilayah dan penataan ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Makalah ini disajikan dalam Studium General Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) di Yogyakarta, 1 September 2003
- Edwards, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Idihan, Agul (2004). Upaya Pengembangan Kawasan Wisata Bukit Lawang dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Laporan Penelitian USU, Medan. Inpres RI No. 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
- Islamy, Irfan (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- KepGub Prop. DKI Jakarta No. 127 tahun 2002 tentang Pola Hubungan Kerjasama Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan Pemda lain.
- Laporan Penelitian (2001). Kawasan Agribisnis Masyarakat Peternakan: Jagung-Salak-Jatimas-Sapi Kereman di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Universitas Brawidjaya, Malang
- Linblom, Charles E. (1986) *Proses Penetapan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Navalina, DA(2009). Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Papuma, Jember. Undip.

Puspita, Indira (2005). Zonasi Kondisi Kawasan Hutan Negara di Dieng dan Arah Pengelolaan yang Berwawasan Lingkungan. Tugas Akhir tidak dipublikasikan. Semarang: Fakultas Teknik,Undip, Semarang

Riggs, FW (1986). Administrasi Pembangunan (Terjemahan). Jakarta: CV Rajawali

Senge, Peter (1994). The Fifth Discipline: The Art and Pracatice of the learning organization. Paperback edition. New York.

Sistem Pemerintahan Daerah (2008). Modul Universitas Terbuka. Jakarta: Penerbit Universittas Terbuka

Suara Merdeka, Hutan Kawasan Dieng Kritis: Tata Guna Tanah Berubah Jadi Lahan Pertanian. Senin, 26 Mei 2003

Sukmana, Oman (2007). Model Pengembangan Lingkungan Kota Ekowisata (Studi di Wilayah Kota Batu). Laporan Penelitian FISIP-UMM.

UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(<http://www.terranet.or.id/tulisandetil.php?id=2062>)

(http://www.ppk.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil.asp?Vnomer=1227)

(<http://sosbud.kompasiana.com/2009/11/24/mari-kita-selamatkan-dieng/>)

[http://www.sintang.](http://www.sintang.go.id/tataruang/default.asp?id=11)

[go.id/tataruang/default.asp?id=11](http://www.sintang.go.id/tataruang/default.asp?id=11). Tata Ruang. Desember, 2006

<http://boemipodjok.multiply.com/reviews/item/4>, Radar Bromo, Jumat, 08 Sept 2006.

http://www.forplid.net/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=98. Kemal Taruc, 2007.

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0611/07/jab05.html>. Jonder Sihotang, 2006.

www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2907/. Strategi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata menjelang AFTA 2003. Meutia Hatta Swasono